

## 4 Perusahaan Diduga Terlibat dalam Kasus Tidur Bareng Syarat Perpanjangan Kontrak

**BEKASI (IM)** - Anggota Komisi VIII DPR RI Obon Tabroni mengaku telah mengan-tongi empat nama perusa-haan yang mensyarat-kan tidur bareng bos sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak karyawati Cikarang.

Obon mengaku se-jauh ini telah menjalin komunikasi kepada se-jumlah korban, dengan AD (24) sebagai korban pertama yang sejauh ini sudah membuat laporan ke polisi.

“Hingga saat ini baru satu orang yang berani membuat laporan ke-polisian. Namun sejauh ini sudah ada oknum dari empat perusahaan yang mengisyaratkan telah melakukan tindakan pelecehan seksual dengan modus perpanjangan kontrak,” kata Obon di Mapolres Metro Bekasi, Sabtu (6/5).

Obon berharap kasus ini mendapatkan atensi dari pemerintah pusat. Pasalnya, kesewenang-wenangan terhadap buruh atau pekerja perempuan sudah sering terjadi. Hal ini merupakan bentuk dari eksploitasi maupun pelecehan seksual.

“Pemerintah seyogianya merespons kasus ini, salah satu cara paling mudah dengan melaku-kan sosialisasi ke perusa-haan kemudian memberikan penekanan. Jika ada kasus ini ditemukan di perusahaan, maka jangan kasih ampun,” ucapnya.

Politisi dari Partai Gerindra itu berharap agar korban lain bersedia melaporkan kejadian ini sehingga kepolisian bisa segera menindaklanjuti kasus tersebut. Obon memastikan banyak instansi yang akan menjamin keamanan dan keselamatan korban.

“Kalau dari sisi keaman-an, kita ada LPSK kemudian pemda punya, aman dari sisi ke-selamatan. Tapi kalau dari sisi yang lain, sekarang

kan kalau apa-apa secara emosi segala macam, belum semua orang siap. Tapi kalau banyak orang berani, pasti kita akan bantu,” ucapnya.

### Tidak Bekerja Usai Buka Suara

Sementara itu, AD (23) seorang karyawati korban ajakan staycation oleh atasannya agar di-perpanjang kontrak kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tidak bekerja usai muncul dan buka suara ke publik. AD merasa trauma dan ter-tekan terhadap atasannya yang merupakan manajer dari perusahaan.

“Sebetulnya saat ini masih dalam kontrak kerja cuma sudah tidak masuk kerja karena alasan trauma itu terhadap atasannya tersebut,” kata Kuasa Hukum AD, Wahyu Haryadi, Sabtu (6/5).

Meski begitu, kata Wahyu, pihaknya belum menerima surat teguran dari perusahaan akibat AD tidak masuk kerja. “Kami belum menerima saksi tersebut,” lanjut dia.

Dia menduga ada karyawati lainnya yang masih enggan melapor-kan kejadian serupa dengan kliennya. Pernyataan itu dia dengar berda-sarkan pengakuan lang-sung dari AD.

“Kemungkinan ada korban-korban lain yang mungkin tidak berani mengadukan atau tidak berani untuk melakukan pelaporan-pelaporan. Iya diceritakan langsung klien kami,” jelas Wahyu.

Sebelumnya Polres Metro Bekasi segera memanggil manajer perusa-haan di Cikarang, Kabu-paten Bekasi, Jawa Barat. Hal itu menyusul laporan dugaan pelecehan seksual yang dibuat oleh AD.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul meng-atakan pihaknya telah menerima laporan AD pada Sabtu siang (6/5).

● pp

# 4 | Metropolis

FOTO/ANT



## HBKB JAKARTA KEMBALI DIADAKAN

Warga berolah raga di kawasan Bundaran HI saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta, Minggu (7/5). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengadakan HBKB di Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin usai libur Lebaran 2023.

# Heru Budi Dituding Antipendatang, Dilaporkan Ampera ke Komnas HAM

**Advokat Merdeka Pembela Rakyat (AMPERA) melaporkan Penjabat Gubernur Heru Budi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap pendatang baru.**

**JAKARTA (IM)** - Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menampik bahwa Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono antipendatang sebagaimana yang disampaikan oleh Advokat Merdeka Pembela Rakyat (AMPERA) yang berujung pada pelaporan ke Komnas HAM.

“Loh mana ada antipendatang? Kita mengimbau supaya (untuk) ketertiban di Jakarta, kemudian ketertiban masyarakat itu, kan jelas,” kata

Joko saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Minggu (7/5).

Menurutnya, tidak hanya Jakarta yang memberikan imbauan bagi pendatang. Sebab, imbauan itu dilakukan untuk kebutuhan pendataan jumlah penduduk agar data kependudukan lebih akurat. “Di daerah mana pun, selain Jakarta, di daerah lain pun seperti itu. Pemerintah akan selalu melakukan pendataan jumlah penduduk,” ujarnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur

DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mempersilakan warga dari luar Jakarta untuk menetap di Ibu Kota. Namun, syaratnya adalah pendatang baru itu sudah memiliki pekerjaan atau keterampilan tertentu.

“Ya, kan kita tidak bisa (melarang), mereka, kan, punya hak untuk datang cuma kita minta mudah-mudahan yang datang itu sudah ada pekerjaan yang pasti dan seterusnya,” kata Heru Budi di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 27 April 2023 lalu.

Heru Budi juga sempat mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem di Jakarta terkendala sejumlah hal, satu di antaranya adalah penambahan pendatang baru ke Ibu Kota.

Namun demikian, Advokat Merdeka Pembela Rakyat (AMPERA) melaporkan Penjabat Gubernur Heru Budi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap pendatang baru.

Ketua AMPERA, Muhammad Muallimin mengatakan, pengaduan tersebut merupakan buntut dari pernyataan kedua pejabat DKI tentang pendatang baru di Jakarta.

“Kami tidak setuju dengan pernyataan publik dan narasi kedua pejabat ini yang cenderung antipendatang. Nada bicara mereka seperti alergi pada orang daerah,” kata Muallimin, Jumat lalu.

Ia pun menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas untuk bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah NKRI. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

“Kenapa pendatang ditakut-takuti untuk segera jelas memiliki pekerjaan dan tempat tinggal layak di Jakarta? Apa maksud pendatang harus siap mental? Seolah pendatang ini dianggap anak kecil yang merepotkan,” ujarnya.

● yan

## Tak Boleh Ada Kegiatan Politik di CFD

**JAKARTA (IM)** - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, Arifin memastikan tidak ada kegiatan yang bermuatan politik di Car Free Day atau CFD Jalan Thamrin-Bundaran HI- Jalan Sudirman. Menurutnya, jika ditemukan hal tersebut, maka pihaknya akan segera menghalau.

“Pokoknya yang berbicara tentang politik enggak boleh. Kritik keraslah pokoknya di sini (CFD) enggak boleh,” kata Arifin saat ditemui di Kawasan Bundaran HI, Minggu (7/5).

Menurutnya, kegiatan CFD diperuntukkan kegiatan olahraga, seni, dan budaya, sementara kegiatan yang bermuatan politik dilarang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (KBKB). Pergub tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012, mengenai Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

“CFD itu bentuk kegiatannya apa? Untuk olahraga, seni, budaya, ekonomi boleh tapi kalau bicara politik enggak boleh,” ujarnya.

Arifin mengatakan jika ditemukan kegiatan yang ber-

nuansa politik, maka Satpol PP DKI akan menindak dengan menghalau para peserta untuk meninggalkan area CFD.

“Kami akan bilang ibu/bapak mohon maaf kegiatan ini (politik) enggak boleh, ibu/bapak silakan keluar (area CFD). Kan ada simpang-simpang jalan,” ucapnya.

Pasal 7 ayat (1) Pergub No. 12 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, dan seni dan budaya.

Berikutnya, pada Pasal (2) dikatakan bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Di dalam Pasal 9 ayat 2 poin (a) juga disebutkan bahwa partisipasi kegiatan ini harus mengisi dan mengiriskan formulir Permohonan Partisipasi Pelaksanaan HBKB kepada Penyelenggara HBKB.

Hal tersebut sebagaimana tercantum pada Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur atau partisipasi bisa mengisi formulir secara online di website www.jakarta.gp.id, paling lambat dua pekan sebelum pelaksanaan HBKB. ● yan

## Lentera Anak Tak Setuju Heru Budi Minta KJP Pelajar yang Merokok Dicabut

**JAKARTA (IM)** - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan mengaktifkan kembali sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar atau KJP bagi siswa yang kedapatan merokok. Menurut dia, jatah KJP itu akan dialihkan kepada siswa lainnya yang lebih layak menerima subsidi pendidikan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

“Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok, maka KJP-nya wajib dicabut,” kata dia dalam sambutan di acara Pembukaan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) ke-3 PGRI DKI Jakarta Masa Bakti XXII Tahun 2023 di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jumat kemarin.

Heru mengutarakan kemampuan Pemprov DKI untuk menyalurkan subsidi pendidikan kepada siswa/siswi seluruh wilayah Jakarta terbatas. Karena itulah, KJP anak yang terciduk merokok sebaiknya dialihkan untuk orang lain.

“Supaya kami berikan ke anak lain karena kemampuan Pemda terbatas,” ujarnya.

Rencana ini tak lepas dari kritik. Salah satunya dari Yayasan Lentera Anak. Begini katanya.

Negara harusnya melindungi, bukan menyalahkan

Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari mengatakan negara seharusnya bersikap melindungi anak agar tidak merokok dan bukan langsung menyalahkan anak merokok. Menurut dia, akar masalah sesungguhnya bukan pada anak, tetapi pada ketidakhadiran negara untuk melindungi anak dari rokok.

“Kita begitu mudah me-

nyalahkan dan menghukum anak yang merokok, padahal kita sadar perilaku merokok ini disebabkan anak secara psikologis memang sedang berkembang, dan mudah dipengaruhi. Sehingga alih-alih menyalahkan anak, justru kita seharusnya membentengi anak dari pengaruh yang buruk dengan membuat perlindungan yang kuat melalui regulasi,” kata Lisda dalam siaran pers yang diterima Sabtu malam (6/5).

Lisda yang aktif mengkampanyekan perlindungan anak dari paparan asap dan iklan rokok juga mengingatkan, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990. Dengan meratifikasi itu, pemerintah wajib melindungi hak anak, salah satunya hak anak untuk sehat.

Lisda mengatakan, negara harus hadir melindungi kesehatan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, termasuk anak.

Perlindungan itu diberikan melalui penerbitan regulasi yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Salah satunya, melalui regulasi yang melindungi anak dari zat adiktif.

“Anak-anak terus menjadi korban bahaya rokok melalui paparan asap rokok dan gempuran iklan, promosi dan sponsor rokok yang masif,” kata dia. yan

Lisda menuturkan, sudah banyak studi menjelaskan relasi dari paparan iklan rokok yang terus menerus terhadap keinginan untuk merokok. Anak-anak yang secara psikologis masih dalam tahap berkembang akan mudah dipengaruhi oleh kepungutan iklan dan promosi rokok dengan visual dan tagline yang memperlihatkan gaya hidup anak muda kreatif, keren dan macho. ● yan

## Jelang KTT ASEAN, Heru Kebut Perbaikan Jalan di DKI Jakarta

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mengebut perbaikan sejumlah ruas jalan. Perbaikan itu sebagai persiapan jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 yang akan berlangsung di Jakarta, pada September.

Diharapkan perbaikan itu memberikan kenyamanan dan kelancaran perjalanan para delegasi negara anggota dan mitra ASEAN, saat berada di Jakarta. Guna memastikan kelancaran perbaikan itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau langsung perbaikan jalan tersebut di depan Ratu Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Sabtu (6/5), pukul 22.30 WIB.

Dalam tinjuannya, ia didampingi Plt Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo beserta jajaran. “Perbaikan ini dilakukan dalam rangka menyambut KTT ASEAN. Pada tahap pertama, yaitu malam ini, dikerjakan dari Ratu Plaza sampai ke lampu

merah BI. Kemudian, akan dilanjutkan minggu depan ke sejumlah ruas jalan yang lain,” ujar Heru dalam keterangan resmi, Minggu (7/5).

Selain itu, perbaikan jalan akan dilakukan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta pada ruas Jalan Gatot Subroto-M. T. Haryono. Hal ini juga sebagai tindak lanjut atas aduan warga terhadap kondisi jalan di Jakarta untuk menunjang mobilitas.

“Kami juga terima sejumlah pengaduan terhadap kondisi jalan. Maka, Dinas Bina Marga tahun ini memperbaiki beberapa ruas dan akan dilanjutkan sampai 2024,” pungkas Heru.

Heru juga mempersilakan warganya melaporkan jalan rusak melalui sistem pengaduan elektronik. Pihaknya memastikan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. “Di Jakarta kan ada sistem pengaduan melalui pengaduan elektronik di kelola Dinas Komunikasi dan Informatika dan di pantau oleh Biro Tata

Pemerintahan,” ujar Heru.

Heru juga menyebut di setiap kantor wali kota hingga kelurahan menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Masyarakat dapat melaporkan apa saja terkait Jakarta, tidak melalui jalan rusak. “Banyak pengaduan dari warga melalui loket-loket dan pengaduan electronic dan tentunya semua harus ditindaklanjuti,” bebernya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta warga melaporkan jalan rusak di wilayahnya yang sudah lama tidak diperbaiki melalui Twitter maupun Instagram. Laporan itu, kata Jokowi, bisa dilakukan melalui kolom komentar atau pesan langsung. “Apabila jalan di daerah Anda masih rusak parah dan sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun Twitter ini,” tutur Jokowi melalui akun twitternya @jokowi, Jumat, 5 Mei 2023. ● yan

FOTO: ANTARA



## HARI BEBAS KENDARAAN DI BEKASI

Warga berolah raga saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di jalan Ahmad Yani, kota Beasi, Jawa Barat, Minggu (7/5). Car free day atau HBKB kembali diadakan setelah liburan Lebaran di kota Bekasi setelah ditiadakan selama puasa Ramadhan 2023.

### INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 17 Mei 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

**Kantor Cabang Pembantu A. Yani**

Jl. Ahmad Yani No. 88 C  
Samarinda, Kalimantan Timur

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin  
Kantor Samarinda (0541) 732050

Hormat Kami,

PT Bank KB Bukopin, Tbk

**KB Bukopin**